

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

E-Government didefinisikan sebagai sistem pengelolaan informasi dan pelayanan publik yang menggunakan internet sebagai basisnya yang disediakan oleh pemerintah bagi masyarakat. Tujuan utama E-Government adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik, memperluas akses informasi yang dimiliki pemerintah, menangani keluhan masyarakat, serta menjamin kualitas layanan yang merata bagi seluruh warga negara.

Kementerian perhubungan bertanggung jawab untuk memastikan peningkatan kinerja pegawai dan optimalisasi layanan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, proses administrasi dan optimalisasi pelayanan bisa disederhanakan, dipercepat, dan lebih terjangkau bagi masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan, diperlukan reformasi birokrasi.

Salah satu bentuk nyata dari implementasi e-Government di Kementerian Perhubungan ialah penerapan e-Kinerja. E-kinerja adalah sistem digital yang digunakan untuk memantau, mengukur, dan menilai kinerja pegawai secara elektronik. Sistem ini biasanya diterapkan oleh instansi pemerintah atau perusahaan untuk membantu mencatat aktivitas dan hasil kerja pegawai secara lebih transparan, efisien, dan akurat. Dengan e-kinerja, data kinerja pegawai dapat diinput, diproses, dan dianalisis secara otomatis melalui platform online, sehingga memudahkan proses evaluasi dan pelaporan.

Dasar hukum pembuatan E-Kinerja yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan ialah Surat Edaran (SE) No.18 Tahun 2023 tentang Penggunaan Aplikasi E-Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Semua pegawai ASN Kementerian Perhubungan wajib menggunakan Aplikasi E-Kinerja mulai November 2023. E-Kinerja adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menilai dan mengukur kinerja pegawai berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja serta menjadi dasar perhitungan prestasi kerja. Menurut Rivai (2005), manfaat diterapkannya *e-kinerja* adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui optimalisasi kinerja ASN
2. Mengukur kinerja ASN
3. Mengetahui kontribusi ASN terhadap organisasi
4. Mendorong ASN berinisiatif dalam pelaksanaan tugas guna tercapainya tujuan organisasi
5. Sebagai bahan evaluasi kinerja pegawai, bahan analisa kebutuhan pegawai dan bahan pembinaan serta pengembangan pegawai dan organisasi.

Aplikasi e-Kinerja Kementerian Perhubungan adalah hasil pengembangan dari Aplikasi Penilaian dan Perhitungan Kinerja Pegawai (AP2KP) yang disesuaikan dengan peraturan terbaru, yaitu PERMENPAN No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan KM 254 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Pegawai di Lingkungan kementerian Perhubungan. Aplikasi ini digunakan oleh pegawai ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk melaporkan kinerja masing-masing unit kerja sebagai alat penilaian kinerja pegawai, yang menjadi dasar perhitungan

tunjangan kinerja. Aplikasi e-Kinerja Kemenhub sudah terintegrasi dengan aplikasi e-Performance dan Sistem Informasi Kepegawaian. Oleh karena itu, sebelum mengisi data di Aplikasi e-Kinerja, unit kerja harus menginput dan menetapkan Perjanjian Kinerja Organisasi di Aplikasi SIK sudah benar. Fungsi dari penggunaan E-Kinerja bagi pegawai diantaranya ialah untuk:

1. Membuat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
2. Membuat rencana aksi.
3. Membuat realisasi laporan bulanan.
4. Evaluasi kinerja pegawai.
5. Dasar perhitungan Tunjangan Kinerja (Tukin).
6. Pembagian tugas kepada pegawai yang dilakukan oleh kepala kantor agar IKK (Indikator Kinerja Kegiatan) organisasi dapat tercapai.

Penerapan aplikasi e-kinerja dilakukan karena ada pegawai yang bekerja tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta tidak sesuai dengan beban kerja masing-masing pegawai. Selain itu, penempatan jabatan seringkali tidak didasarkan pada kompetensi individu dan kompetensi jabatan, penilaian kinerja yang dilakukan masih bersifat subjektif, dan banyak pegawai yang kurang disiplin dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Akibatnya, hasil pekerjaan para pegawai tidak efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga membuat sistem pelayanan publik menjadi lambat, berbelit-belit, dan tidak berjalan dengan maksimal.

E-Kinerja juga berfungsi sebagai alat bantu dalam penghitungan tunjangan kinerja pegawai. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 pasal 80 ayat 3 yang menyatakan bahwa tunjangan kinerja

dibayarkan berdasarkan pencapaian kinerja. Selain itu, E-Kinerja juga berperan dalam memantau aktivitas pegawai selama jam kerja. Kebijakan e-kinerja ini diharapkan menjadi motivasi bagi ASN untuk meningkatkan kinerja dan membawa perubahan dalam cara bekerja, membuat ASN yang sebelumnya kurang disiplin menjadi lebih disiplin dan memiliki daya saing tinggi.

Aplikasi e-Kinerja Kementerian Perhubungan dapat diakses melalui halaman <https://e-kinerja.kemenhub.go.id> dengan menggunakan username dan password pada Aplikasi SIK. Proses pengisian aplikasi e-Kinerja Kementerian Perhubungan terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
2. Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Aksi;
3. Evaluasi Kinerja Bulanan.

Namun, penerapan aplikasi e-kinerja di Kementerian Perhubungan tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

Tabel 1.1 Jumlah Permasalahan Penggunaan Aplikasi Tahun 2023

Jenis Permasalahan	Jumlah Ulasan
Penilaian bersifat subjektif	2
Aplikasi yang belum maksimal	3
SDM yang kurang terlatih	17

Sumber Data: Diolah melalui Media Sosial (Youtube dan Twitter)

Berikut terdapat penjelasan dari tabel diatas mengenai penggunaan e-kinerja:

1. Penilaian dari atasan bersifat subjektif

Berdasarkan peraturan tersebut, besaran Tambahan Penghasilan yang akan diterima ASN sesuai dengan laporan kinerja yang diinput ke dalam aplikasi E-Kinerja. Besaran Tambahan Penghasilan yang diterima oleh ASN ditentukan berdasarkan nilai yang telah diverifikasi oleh atasan masing-masing bagian. Maka dari itu, persetujuan atasan sangat menentukan besaran Tambahan Penghasilan yang akan diterima oleh ASN. Oleh karena itu, penilaian bisa bersifat subjektif atau berdasarkan pengalaman pribadi atasan.

2. Aplikasi yang belum maksimal

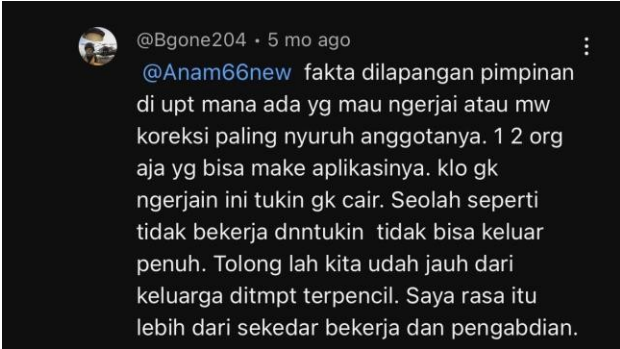
Hal tersebut juga sering menjadi kendala dalam implementasi e-kinerja dan hampir setiap akhir bulan terjadi permasalahan akses karena penggunaan yang tinggi oleh pegawai untuk menyelesaikan proses penginputan dan verifikasi pelaporan. Selain itu terdapat kekurangan pada menu Aplikasi E-Kinerja yaitu jika terdapat pegawai yang sakit atau mengikuti pendidikan dan pelatihan, aplikasi tersebut belum dapat memfasilitasi hal tersebut, maka pegawai harus tetap mengisi ketertinggalan kegiatan agar capaian kinerja bulanan dapat tercapai sehingga tidak berdampak pada pengurangan tunjangan kinerja pegawai, serta aplikasi penilaian tersebut belum terhubung dengan mesin daftar hadir biometrik (*fingerprint*) dan Aplikasi E-Kinerja), sehingga jika ada perubahan pada pegawai harus diperbaharui setiap aplikasi. Tampilan Aplikasi yang rumit juga menjadi salah satu faktor

pegawai sulit untuk beradaptasi dengan aplikasi tersebut seperti yang akan dijelaskan pada permasalahan berikutnya.

3. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang terlatih

Kurangnya pemahaman terkait penggunaan e-kinerja dan masih adanya ASN yang kurang kompeten dalam mengoperasikan komputer. Akibat keterbatasan tersebut, beberapa ASN meminta admin kantor untuk menginput laporan hariannya, yang sering mengakibatkan kesalahan penginputan dan berdampak fatal pada laporan akhir. Berdasarkan fakta di lapangan masih ditemukan ada beberapa pegawai yang tidak mengisi laporan harian disebabkan oleh beberapa hal antara lain: rasa malas pegawai itu sendiri untuk mengisi laporan harian ke dalam aplikasi e-kinerja. Kedua, pegawai memiliki prioritas pekerjaan lain yang harus dikerjakan terlebih dahulu sehingga pegawai tidak sempat mengisi laporan harian tersebut.

Tabel 1.2 Data Pendukung Pengaduan Penggunaan E-Kinerja

Nomor	Rincian Pengaduan	Penjelasan
1.	 @Bgone204 • 5 mo ago @Anam66new fakta dilapangan pimpinan di upt mana ada yg mau ngerjai atau mw koreksi paling nyuruh anggotanya. 1 2 org aja yg bisa make aplikasinya. klo gk ngerjain ini tukin gk cair. Seolah seperti tidak bekerja dnntukin tidak bisa keluar penuh. Tolong lah kita udah jauh dari keluarga ditmpt terpencil. Saya rasa itu lebih dari sekedar bekerja dan pengabdian.	Pernyataan dari pengguna yang mengatakan bahwa penilaian dari atasan bersifat subjektif

2.		Tampilan yang cukup rumit untuk dipahami
3.	@lxvnara • 3 mo ago bang buat kan contoh untuk pengisian lapbul bulan selanjutnya dong 1 @sikambingwangi3699 • 6 mo ago Jika sedang tugas belajar, bagaimana cara membuat rencana aksi? 1 @Bgone204 • 5 mo ago Tutor memperibet aplikasi gajelas 1	Masih terdapat banyak karyawan yang tidak mengerti menggunakan e-kinerja tersebut

Technology Acceptance Model (TAM) dapat menjelaskan penerimaan sistem e-kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan melalui dua faktor utama, yaitu *Perceived Usefulness* (PU) dan *Perceived Ease of Use* (PEOU). PU berkaitan dengan persepsi pegawai tentang seberapa besar e-kinerja meningkatkan efisiensi, akurasi, dan produktivitas kerja mereka, seperti mempercepat proses evaluasi kinerja, meningkatkan transparansi, dan mempermudah pemantauan capaian kerja. PEOU mengacu pada seberapa mudah pegawai merasa dapat menggunakan sistem e-kinerja tanpa menghadapi kesulitan teknis.

Dalam implementasinya, keberhasilan e-kinerja di Kementerian Perhubungan sangat bergantung pada persepsi pegawai terhadap kegunaan sistem ini dan kemudahan penggunaannya. Jika pegawai merasa sistem ini mendukung tugas mereka dan mudah digunakan, maka niat mereka untuk terus menggunakan dan mengadopsi sistem tersebut akan meningkat. TAM membantu mengidentifikasi faktor-faktor ini, sehingga dapat dilakukan intervensi atau pelatihan yang tepat guna memaksimalkan adopsi e-kinerja dalam meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi.

Alasan memilih untuk meneliti *e-kinerja* di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dibandingkan kementerian lain adalah Transformasi digital di Kementerian Perhubungan saat ini sedang berlangsung secara aktif, sehingga implementasi E-Kinerja menjadi topik penelitian yang relevan dan strategis. Selain itu, dengan keberagaman usia pegawai di lingkungan Kemenhub, penggunaan Technology Acceptance Model (TAM) dapat membantu menganalisis tingkat penerimaan teknologi oleh para pegawai serta faktor-faktor yang memengaruhi

adopsi sistem tersebut. Dengan berlandaskan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian **“PENGARUH VARIABEL *PERCEIVED USEFULNESS* DAN *PERCEIVED EASE OF USE* TERHADAP *BEHAVIOURAL INTENTION TO USE* PADA APLIKASI E-KINERJA DI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN: TINJAUAN BERDASARKAN PENDEKATAN *TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM)*”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa E-Government membawa dampak positif untuk mempermudah pengelolaan kinerja pegawai, penilaian prestasi kerja, serta fungsi pengawasan atasan terhadap bawahan di suatu instansi atau unit kerja. Namun, implementasi ini belum berjalan sesuai yang diharapkan karena kurangnya perencanaan yang baik. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dikaji adalah:

1. Bagaimana pengaruh variabel *Perceived Usefulness* terhadap Variabel *Behavioral Intention to Use*?
2. Bagaimana pengaruh Variabel *Perceived Ease of Use* terhadap Variabel *Behavioral Intention to Use*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diberikan, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk Mengetahui pengaruh variabel Perceived Usefulness terhadap variabel Behavioral Intention to Use?
2. Untuk Mengetahui pengaruh variabel Perceived Ease of Use terhadap variabel Behavioral Intention to Use?

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Mengungkapkan Peranan Teknologi Informasi dalam Tata Kelola Pemerintahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi orisinal dalam literatur akademis dan memberikan wawasan baru bagi praktisi pemerintahan yang ingin memenuhi tuntutan masyarakat akan tata kelola yang lebih baik.

2. Membangun Wawasan Baru dalam Pelayanan Publik Melalui E-Government.

Dengan meneliti inovasi dalam pelayanan publik berbasis digital, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman tentang penggunaan teknologi dalam konteks e-Government. Melalui demikian, penelitian ini tidak hanya berguna secara akademis, tetapi juga berpotensi memberikan dampak positif

dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan publik secara keseluruhan.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Pada manfaat teoritis ini diharapkan dari penelitian dapat memberikan sebuah kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam mengenai kebijakan publik, serta dapat memberikan sumbangan dari pemikiran serta tambahan wawasan bagi penelitian lainnya yang melakukan penelitian.

1.5 Kajian Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian/jurnal/Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
1.	Putra Widiyanto, D. N. (2023). <i>OPTIMALISASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DAN LAYANAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DI KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH</i> (Doctoral dissertation, Universitas	Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi permasalahan dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dan pelayanan di Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. Selain itu, penelitian ini akan merumuskan	a. Teori Motivasi: Mengkaji teori-teori motivasi seperti Herzberg, Teori Harapan, dan Teori Keadilan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. b. Pengukuran Kinerja: Menganalisis metode pengukuran kinerja pegawai, termasuk pendekatan	Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed methods) dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner/survei, wawancara, observasi, dan studi dokumen, untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang efektivitas SIMPEG dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai di Kementerian Agama Provinsi	Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah berdampak positif pada peningkatan kinerja pegawai, seperti efisiensi waktu, akurasi data, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kepegawaian. Keberhasilan ini didukung oleh komitmen pimpinan, pelatihan pegawai, dan ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai, sehingga pemanfaatan

	Islam Sultan Agung).	strategi optimalisasi SIMPEG dan pelayanan guna meningkatkan kinerja pegawai di instansi tersebut.	tradisional (penilaian kuantitatif dan kualitatif) serta pendekatan modern seperti Balanced Scorecard (BSC) dan Key Performance Indicators (KPI).	Jawa Tengah.	SIMPEG optimal untuk meningkatkan kinerja dan pengelolaan kepegawaian.
2.	Karunia, R. L. (2023). <i>Implementation of e-Government for Better Public Service at Lombok Barat. KnE Social Sciences</i> , 379-390.	Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lombok Barat. Fokusnya adalah mengevaluasi aspek kebijakan, strategi pemerintah daerah, infrastruktur teknologi, serta partisipasi dan respons masyarakat terhadap layanan e-government.	Landasan teori ini menggunakan teori e-government dan teori kinerja pegawai. Teori e-government mencakup penggunaan TIK untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik. Teori kinerja pegawai mengukur kemampuan pegawai dalam menyelesaikan tugas berdasarkan kuantitas, kualitas pekerjaan, efisiensi waktu, dan kerjasama tim.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis implementasi e-government. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pejabat, pegawai, dan masyarakat, observasi di kantor pemerintah, serta tinjauan dokumen terkait kebijakan e-government dan kinerja pegawai.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government di Kabupaten Lombok Barat berdampak positif pada kualitas pelayanan publik, seperti efisiensi waktu, peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan akses informasi. Layanan yang diterapkan mencakup SIMPEG, Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Administrasi Kependudukan, dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
3.	Willy Kumala	Tujuan dari	1. Teori Kinerja	Jurnal ini	Penerapan e-kinerja di

	Anjarini. (2022), Penilaian Kinerja Pegawai Untuk Menentukan Prestasi Kerja Melalui Penerapan Sistem E-Kinerja Pada Kantor UPTD pengelolaan sumber daya Air (PSDA)Lampung Timur.	penelitian ini adalah untuk menilai kinerja pegawai dalam menentukan prestasi kerja melalui penerapan sistem e-kinerja pada Kantor UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Lampung Timur.	Pegawai: Mengkaji konsep kinerja pegawai, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan pentingnya penilaian kinerja untuk menentukan prestasi kerja. 2. Teori Sistem Informasi: Membahas konsep, komponen, dan peran sistem informasi dalam mendukung proses bisnis organisasi. Teori ini menjelaskan bagaimana e-kinerja dapat membuat penilaian kinerja lebih efisien dan terukur.	menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada 50 pegawai di UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Lampung Timur. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan kondisi kinerja pegawai dan efektivitas sistem E-Kinerja.	UPTD PSDA Lampung Timur meningkatkan objektivitas, efisiensi, transparansi, dan organisasi penilaian kinerja pegawai. Didukung oleh komitmen pimpinan, pelatihan, dan infrastruktur teknologi. E-kinerja memberikan gambaran akurat kinerja pegawai, mendukung keputusan promosi, penghargaan, dan pengembangan kompetensi.
4.	Auliyaa, P., Hidayat, R., & Nababan, R. (2021). Implementasi pelayanan publik berbasis e-government melalui ogan lopian. <i>KINERJA</i> , 18(4), 502-512.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelayanan publik berbasis e-government melalui program Ogan Lopian (Online Pelayanan Terpadu) di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.	1. Teori e-government: Teori ini menjelaskan pentingnya penerapan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Ogan Ilir.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei/kuesioner untuk mengumpulkan data tentang persepsi masyarakat dan pegawai terhadap layanan Ogan Lopian. Metode pengumpulan data mencakup	Implementasi Ogan Lopian, platform e-government di Kabupaten Ogan Ilir, memberikan hasil positif dengan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik, memangkas birokrasi, dan mempermudah akses masyarakat terhadap informasi. Dukungan pemerintah

		Program ini akan mengevaluasi sejauh mana program tersebut berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik.	2. Teori pelayanan publik: Teori ini menjelaskan bagaimana e-government dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan prinsip pelayanan yang baik.	kuesioner, wawancara, observasi, dan analisis dokumen.	dilihat dari penyediaan anggaran, infrastruktur TIK yang handal, serta pelatihan dan sosialisasi untuk pegawai dan masyarakat.
5.	Hakim, R., Umam, K., & Anwar, H. S. (2021). <i>Implementation of E-government through the Samsat mobile Jawa barat at the regional revenue agency of West Java province. PUBLICA</i> , 13(2), 134-148.	Fokus penelitian meliputi efektivitas aplikasi SAMBARA dalam meningkatkan pelayanan pajak kendaraan bermotor (PKB), efisiensi aplikasi dalam meningkatkan kinerja pegawai Bapenda, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap aplikasi dalam pelayanan PKB.	Teori e-government dan teori pelayanan publik untuk menganalisis implementasi Samsat Mobile Jawa Barat di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik, serta mengurangi biaya	Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang implementasi Samsat Mobile Jawa Barat di BPD Provinsi Jawa Barat. Data dikumpulkan melalui tiga metode: 1) Wawancara: dengan pejabat pemerintah, pegawai, dan masyarakat; 2) Observasi: di kantor Samsat di Jawa Barat; dan 3) Tinjauan dokumen: untuk mengumpulkan data tentang kebijakan e-	Implementasi SAMBARA di Bapenda Provinsi Jawa Barat berhasil, terlihat dari peningkatan signifikan transaksi pajak kendaraan bermotor (PKB) online, yang mencapai lebih dari 3 juta pada 2021. Waktu tunggu pelayanan PKB menurun menjadi rata-rata 15 menit di Samsat yang menggunakan SAMBARA, dibandingkan 30 menit di yang tidak. Dengan 85% responden merasa puas, mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas teknologi dalam administrasi pemerintahan.

			operasional.	government.	
6.	Rachmawati, T., & Fitriyanti, K. D. (2021). Analysis of the E-government initiative at local government level in Bandung City, Indonesia. <i>Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik</i> , 25(1), 62-80.	Secara khusus, penelitian ini akan mengevaluasi berbagai program dan kebijakan e-government yang telah diterapkan oleh pemerintah Kota Bandung.	Teori e-government mencakup konsep, jenis layanan, dan manfaat teknologi informasi dalam administrasi publik. Teori pelayanan publik membahas prinsip-prinsip pelayanan yang baik serta faktor-faktor yang mempengaruhi kualitasnya, Teori kebijakan publik meliputi perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan.	Menggunakan metode campuran dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif mencakup survei untuk mengumpulkan data persepsi masyarakat dan pegawai terhadap layanan e-government serta analisis statistik. Pendekatan kualitatif melibatkan wawancara mendalam, observasi proses pelayanan publik, dan studi dokumen terkait kebijakan e-government.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-government di Kota Bandung meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan efisiensi waktu dan biaya, transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan akses informasi. Layanan e-government yang diterapkan meliputi SIMPEG, Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
7.	Rosilawati, Y., Nurjanah, A., & Amriyanto, H. (2021, January). The Use of "Jogja Istimewa" for Improving E-Government and Public Service Delivery in Yogyakarta. In <i>4th International Conference on Sustainable</i>	Penelitian ini menganalisis penggunaan platform "Jogja Istimewa" untuk meningkatkan e-government dan layanan publik di Yogyakarta. Tujuan utamanya adalah menilai efektivitas platform dalam meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan masyarakat	Teori E-government untuk menyediakan layanan publik yang efisien, efektif, dan akuntabel. Ini meningkatkan transparansi, responsivitas, dan partisipasi masyarakat. Kepuasan masyarakat mencakup kebahagiaan	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi penggunaan platform "Jogja Istimewa" dalam e-government dan pelayanan publik di Yogyakarta. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah, pegawai, dan	Penelitian ini menunjukkan bahwa platform "Jogja Istimewa" meningkatkan e-government dan layanan publik di Yogyakarta. Platform ini mengintegrasikan layanan online, termasuk informasi kebijakan, administrasi publik, dan pengaduan masyarakat. Hasilnya, terjadi peningkatan jumlah pengguna,

	<i>Innovation 2020–Social, Humanity, and Education (ICoSIHESS 2020)</i> (pp. 457-463). Atlantis Press.	melalui indikator kecepatan pelayanan, kemudahan akses, dan transparansi.	terhadap layanan publik, diukur melalui persepsi kualitas, tingkat kepuasan, dan kepercayaan pada pemerintah.	masyarakat pengguna layanan untuk menggali informasi tentang pengembangan, tantangan, dan manfaat platform.	penurunan waktu tunggu, dan peningkatan kepuasan masyarakat berdasarkan survei dan umpan balik.
8.	Sorongan, E., Sari, D. R., Kusno, H. S., & Zulfariansyah, M. (2023). Can Satisfaction Interventions Rise Interest in E-Government Service Adoption in Indonesia? The Extended Perspective of The TAM Model. <i>JATISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi)</i> , 10(1), 620-634.	Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap layanan e-government di Indonesia dan menilai dampak intervensi peningkatan kepuasan terhadap minat adopsi layanan tersebut. Dengan mengembangkan model yang diperluas dari Technology Acceptance Model (TAM), penelitian ini menggunakan survei kuantitatif untuk mengumpulkan data. Hasilnya menunjukkan bahwa kepuasan pengguna berpengaruh positif signifikan terhadap minat adopsi layanan e-	Landasan teori penelitian ini meliputi Technology Acceptance Model (TAM), yang menilai penerimaan teknologi melalui dua variabel utama: Perceived Usefulness (PU) dan Perceived Ease of Use (PEOU). Penelitian ini juga memasukkan kepuasan sebagai mediator yang mempengaruhi niat adopsi layanan e-government. Teori kepuasan pengguna menekankan bahwa pengalaman positif dapat meningkatkan niat adopsi, sementara e-government	Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei, di mana kuesioner disebarkan kepada responden untuk mengumpulkan data tentang kepuasan terhadap layanan e-government. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara statistik untuk menguji hubungan antara kepuasan pengguna dan niat adopsi layanan e-government, serta untuk menguji model TAM yang diperluas.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan pengguna berpengaruh positif terhadap minat adopsi layanan e-government. Intervensi yang meningkatkan kepuasan dapat langsung meningkatkan minat masyarakat untuk mengadopsi layanan ini. Model TAM yang diperluas dengan variabel kepuasan efektif dalam menjelaskan niat adopsi layanan e-government. Penelitian ini menekankan pentingnya meningkatkan kepuasan pengguna untuk mendorong adopsi layanan e-government.

		government, serta menekankan pentingnya intervensi untuk meningkatkan kepuasan masyarakat.	berfokus pada penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik.		
9.	Riani, D., Putri, G. A. A., & Pratama, I. P. A. E. (2021). E-Readiness Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Menggunakan Metode Technology Acceptance Model (TAM)(Studi Kasus Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar). <i>Jurnal Ilmiah Teknologi Dan Komputer</i> , 2(3), 503-514.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat e-readiness sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dengan menggunakan pendekatan Technology Acceptance Model (TAM). Penelitian ini juga mengevaluasi faktor yang mempengaruhi penerimaan pengguna terhadap SIPD di Dinas Komunikasi dan Informatika	Technology Acceptance Model (TAM), yang menjelaskan faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi melalui Perceived Usefulness dan Perceived Ease of Use. E-Readiness mengacu pada kesiapan organisasi untuk mengadopsi teknologi informasi, spt infrastruktur, sumber daya manusia, dan budaya organisasi .	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Kuesioner disebarkan kepada pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mengumpulkan data mengenai persepsi mereka terhadap SIPD. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik statistik untuk menguji hubungan antara faktor-faktor dalam TAM dan tingkat e-readiness.	Penelitian menunjukkan bahwa Perceived Usefulness berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan SIPD, artinya pengguna merasa sistem ini meningkatkan efisiensi kerja. Perceived Ease of Use juga mempengaruhi penerimaan, dan kemudahan penggunaan. E-readiness SIPD di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar baik, namun masih ada aspek yang perlu ditingkatkan untuk adopsi teknologi yang lebih luas.
10	Putra, Y. W. S. (2023). Implementasi Model TAM pada Sistem Informasi Presensi Online	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Model Technology Acceptance Model (TAM) dalam sistem	Penelitian ini menggunakan Technology Acceptance Model (TAM), yang menjelaskan pengaruh dua variabel utama,	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada pengguna sistem presensi online. Data yang	Penelitian menemukan bahwa Perceived Usefulness berpengaruh positif signifikan terhadap niat pengguna dalam menggunakan sistem presensi online. Selain itu, Perceived Ease of

Menggunakan Face Recognition dan GPS. <i>Journal of Applied Computer Science and Technology</i> , 4(2), 147-154.	informasi presensi online yang menggunakan teknologi pengenalan wajah (face recognition) dan GPS. Penelitian ini juga ingin mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pengguna terhadap sistem tersebut.	yaitu Perceived Usefulness dan Perceived Ease of Use, terhadap penerimaan teknologi oleh pengguna. Kedua variabel ini berperan penting dalam menentukan niat pengguna untuk menggunakan Sistem Informasi Presensi Online.	terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode statistik untuk menguji pengaruh variabel PU dan PEOU terhadap niat pengguna dalam menggunakan sistem.	Use juga berkontribusi positif, menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan meningkatkan minat pengguna. Secara keseluruhan, sistem presensi online yang menggunakan teknologi pengenalan wajah dan GPS efektif dan berpotensi untuk diadopsi lebih luas.
--	--	---	---	--

Putra Widiyanto, D. N. (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dan Layanan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).” Berfokus pada optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dan pelayanan di Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan dalam SIMPEG serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. Metode yang digunakan adalah metode campuran dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi SIMPEG berdampak positif pada kinerja pegawai, termasuk efisiensi waktu, akurasi data, dan transparansi pengelolaan kepegawaian, didukung oleh komitmen pimpinan dan pelatihan pegawai.

Karunia, R. L. (2023). *Implementasi e-Government untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Lombok Barat*. Penelitian ini berfokus pada implementasi e-government untuk meningkatkan pelayanan publik di Lombok Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak penerapan e-government terhadap kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government telah meningkatkan transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas layanan publik, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal infrastruktur dan kesadaran masyarakat terhadap teknologi.

Willy Kumala Anjarini (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Penilaian Kinerja Pegawai Untuk Menentukan Prestasi Kerja Melalui Penerapan Sistem E-Kinerja Pada Kantor UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Lampung Timur” berfokus pada penerapan sistem e-Kinerja untuk menilai kinerja pegawai dan menentukan prestasi kerja di lingkungan kantor UPTD PSDA Lampung Timur. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-Kinerja telah meningkatkan akurasi dalam penilaian kinerja pegawai, namun masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan, seperti kurangnya pelatihan pegawai terkait penggunaan sistem tersebut.

Auliyaa, P., Hidayat, R., & Nababan, R. (2021) dalam tulisannya yang berjudul “Implementasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Melalui Ogan Lopian” berfokus pada penerapan e-government dalam pelayanan publik melalui

platform Ogan Lopian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Ogan Lopian berhasil meningkatkan transparansi dan aksesibilitas pelayanan, meskipun terdapat tantangan dalam hal infrastruktur dan partisipasi masyarakat.

Hakim, R., Umam, K., & Anwar, H. S. (2021) dalam tulisannya yang berjudul “Implementation of E-Government through the Samsat Mobile Jawa Barat at the Regional Revenue Agency of West Java Province” berfokus pada penerapan e-government melalui aplikasi Samsat Mobile di Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Samsat Mobile dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik, khususnya di bidang pajak kendaraan bermotor. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Samsat Mobile telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak, namun masih terdapat tantangan dalam hal sosialisasi dan infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh wilayah.

Rachmawati, T., & Fitriyanti, K. D. (2021) dalam tulisannya yang berjudul “Analysis of the E-Government Initiative at Local Government Level in Bandung City, Indonesia” berfokus pada analisis inisiatif e-government di tingkat pemerintahan daerah Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi e-government di Kota Bandung, serta dampaknya terhadap pelayanan publik dan transparansi pemerintahan. Metode yang digunakan adalah penelitian

kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun inisiatif e-government telah meningkatkan aksesibilitas dan transparansi layanan publik, masih terdapat kendala teknis dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan teknologi tersebut secara optimal.

Rosilawati, Y., Nurjanah, A., & Amriyanto, H. (2021) dalam tulisannya yang berjudul “The Use of ‘Jogja Istimewa’ for Improving E-Government and Public Service Delivery in Yogyakarta” berfokus pada penggunaan platform "Jogja Istimewa" untuk meningkatkan e-government dan penyampaian layanan publik di Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana platform tersebut memfasilitasi integrasi layanan publik secara digital dan meningkatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa "Jogja Istimewa" berhasil meningkatkan efisiensi layanan publik, tetapi masih terdapat tantangan terkait infrastruktur teknologi dan partisipasi masyarakat.

Sorongan, E., Sari, D. R., Kusno, H. S., & Zulfariansyah, M. (2023) dalam tulisannya yang berjudul “Can Satisfaction Interventions Rise Interest in E-Government Service Adoption in Indonesia? The Extended Perspective of The TAM Model” berfokus pada pengaruh intervensi kepuasan terhadap minat adopsi layanan e-government di Indonesia dengan memperluas model TAM (Technology Acceptance Model). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kepuasan pengguna dapat meningkatkan niat adopsi layanan e-government. Metode

yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pengumpulan data melalui survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi yang meningkatkan kepuasan pengguna berkontribusi signifikan terhadap niat pengguna untuk mengadopsi layanan e-government, serta membuktikan efektivitas model TAM yang diperluas dengan variabel kepuasan.

Riani, D., Putri, G. A. A., & Pratama, I. P. A. E. (2021) dalam tulisannya yang berjudul “E-Readiness Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Menggunakan Metode Technology Acceptance Model (TAM) (Studi Kasus Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar)” berfokus pada analisis kesiapan e-readiness dalam penerapan SIPD di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar dengan menggunakan model TAM. Penelitian ini bertujuan untuk menilai seberapa siap organisasi dalam menerapkan sistem informasi pemerintah daerah berdasarkan *Perceived Usefulness* (PU) dan *Perceived Ease of Use* (PEOU) . Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD telah dinilai cukup siap untuk diadopsi, namun ada beberapa area yang perlu ditingkatkan untuk mendukung adopsi teknologi secara lebih luas.

Putra, Y. W. S. (2023) dalam tulisannya yang berjudul “Implementasi Model TAM pada Sistem Informasi Presensi Online Menggunakan Face Recognition dan GPS” berfokus pada penerapan model Technology Acceptance Model (TAM) pada sistem presensi online yang menggunakan teknologi pengenalan wajah dan GPS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Perceived Usefulness* (PU) dan *Perceived Ease of Use* (PEOU) terhadap niat

pengguna dalam menggunakan sistem presensi online. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem presensi online dengan teknologi ini dinilai efektif, dengan PU dan PEOU memberikan kontribusi positif signifikan terhadap niat pengguna untuk mengadopsi sistem tersebut.

1.5.2 Administrasi Publik

Menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2014: 3), administrasi publik adalah suatu proses di mana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Kedua pengarang tersebut juga menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan gabungan antara seni dan ilmu yang bertujuan untuk mengatur urusan publik dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Sebagai disiplin ilmu, administrasi publik memiliki tujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik dengan cara memperbaiki atau menyempurnakan terutama dalam bidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan.

McCurdy, seperti yang dikutip dalam Keban (2014: 3), mengungkapkan bahwa administrasi publik bisa dipandang sebagai suatu proses politik, di mana merupakan salah satu cara atau metode untuk mengelola suatu negara, dan juga bisa dianggap sebagai cara prinsipil untuk menjalankan berbagai fungsi negara. Dengan kata lain, administrasi publik tidak hanya merupakan persoalan manajerial semata, tetapi juga memiliki dimensi politik. Meskipun anggapan ini mungkin mempersulit dalam mendefinisikan administrasi publik dan ruang lingkupnya, namun hal ini

justu menunjukkan bahwa bidang administrasi publik terus berkembang dan sulit dipisahkan dari dunia politik.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

1. Old Public Administration (OPA) - 1887

Paradigma ini sering disebut sebagai Administrasi Publik Klasik atau Tradisional. OPA berkembang sejak awal munculnya ilmu administrasi negara dan ditandai dengan publikasi buku "*The Study of Administration*" (1887) oleh Woodrow Wilson. Wilson dikenal sebagai pelopor dalam studi administrasi publik dan menjadi salah satu tokoh yang memperkenalkan konsep administrasi negara sebagai suatu disiplin ilmu yang terpisah dari ilmu politik. Ciri utama dari paradigma OPA adalah dominasi pemerintah dalam penyelenggaraan administrasi publik. Pemerintah berperan sebagai satu-satunya aktor utama dalam penyediaan layanan publik dan memiliki kendali penuh atas birokrasi. Sistem administrasi publik dalam paradigma ini menitikberatkan pada hirarki organisasi, kewenangan yang tersentralisasi, serta prosedur yang kaku untuk memastikan keteraturan dalam pelayanan publik.

2. New Public Administration (NPA) – 1968

Paradigma New Public Administration (NPA) muncul sebagai respons terhadap kelemahan dalam paradigma OPA, terutama terkait dengan kurangnya perhatian terhadap aspek sosial dalam administrasi publik. Paradigma ini mulai berkembang sejak diterbitkannya buku "*Principles of Public Administration*" (1927) oleh Willoughby, yang menyoroti pentingnya penerapan prinsip-prinsip

ilmiah dalam administrasi publik. Dalam paradigma ini, administrasi publik mulai mengarah pada pendekatan yang lebih humanis, dengan mempertimbangkan aspek keadilan sosial serta kesejahteraan masyarakat. Salah satu tokoh utama dalam paradigma ini, George Frederickson, mengkritik bahwa administrasi negara sebelumnya hanya berfokus pada efisiensi, ekonomi, dan koordinasi dalam pengelolaan lembaga publik. Oleh karena itu, paradigma NPA menambahkan unsur keadilan sosial sebagai bagian dari tujuan administrasi publik.

3. New Public Management (NPM) – 1980-an

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas dalam tata kelola pemerintahan, para ahli administrasi publik mulai mencari cara untuk menyempurnakan sistem administrasi yang ada. Salah satu solusi yang dikembangkan adalah New Public Management (NPM), yang mulai diperkenalkan pada era 1980-an. Paradigma NPM mengadopsi prinsip-prinsip dari sektor swasta ke dalam administrasi publik. Fokus utama dari paradigma ini adalah meningkatkan kinerja administrasi publik melalui pendekatan berbasis manajemen. Dalam pandangan Rosenbloom & Kravchuck, penerapan NPM harus mempertimbangkan mekanisme pasar, di mana administrasi publik harus bersifat lebih kompetitif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan berorientasi pada hasil.

4. New Public Service (NPS) – 2000

Paradigma terbaru dalam administrasi publik adalah *New Public Service* (NPS), yang diperkenalkan oleh Denhardt & Denhardt sebagai kritik terhadap pendekatan NPM. Mereka berpendapat bahwa penerapan nilai-nilai bisnis dalam administrasi

publik dapat merusak tatanan nilai dalam pelayanan publik, sehingga diperlukan pendekatan baru yang lebih berorientasi pada kepentingan warga negara. Dalam paradigma NPS, peran masyarakat tidak lagi dipandang sebagai konsumen atau pelanggan sebagaimana dalam NPM, tetapi sebagai warga negara (*citizen*) yang memiliki hak dan kewajiban dalam berpartisipasi dalam pemerintahan. Oleh karena itu, paradigma ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses administrasi publik.

Adapun pada penelitian ini menggunakan paradigma yang ketiga, yaitu *New Public Management* (NPM). Paradigma *New Public Management* (NPM) dipilih dalam penelitian ini karena memiliki relevansi yang kuat dengan implementasi e-Kinerja di Kementerian Perhubungan. NPM merupakan pendekatan dalam administrasi publik yang menekankan pada efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, yang juga menjadi tujuan utama dalam penerapan e-Kinerja sebagai sistem manajemen kinerja pegawai. Salah satu alasan utama penggunaan paradigma NPM dalam penelitian ini adalah karena NPM mengadopsi prinsip manajemen sektor swasta ke dalam sektor publik. Dalam konteks e-Kinerja, sistem ini dirancang untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pegawai secara lebih objektif, berbasis hasil, serta mengurangi birokrasi yang berbelit. Prinsip ini sejalan dengan NPM yang menekankan pentingnya kinerja individu sebagai bagian dari peningkatan efisiensi organisasi. Tidak hanya itu, paradigma NPM juga menekankan pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam birokrasi. Dengan e-Kinerja, setiap pegawai memiliki target kerja yang terukur dan terdokumentasi secara sistematis, sehingga mencegah subjektivitas dalam penilaian

kinerja. Hal ini memungkinkan organisasi untuk lebih transparan dalam menilai pencapaian individu dan menentukan kebijakan berbasis data yang lebih akurat.

1.5.4 Kebijakan Publik

Secara terminologi, konsep kebijakan publik memiliki beragam interpretasi, bergantung pada perspektif yang digunakan untuk mengamatinya. Easton, misalnya, menggambarkan kebijakan publik sebagai proses pengalokasian nilai-nilai yang berwibawa bagi seluruh masyarakat atau sebagai tindakan penetapan nilai-nilai yang mengikat bagi semua individu dalam masyarakat. Di sisi lain, Laswell dan Kaplan memandang kebijakan publik sebagai suatu rencana terperinci yang mengarah pada pencapaian tujuan-tujuan tertentu, mengusung nilai-nilai yang diinginkan, dan menetapkan praktik-praktik yang terorganisir.

Pandangan Lasswell dan Kaplan menekankan pada aspek perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik. Mereka melihat kebijakan publik sebagai suatu program terstruktur yang menggambarkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, nilai-nilai yang ingin ditekankan, dan praktik-praktik yang direkomendasikan. Misalnya, sebuah kebijakan kesehatan masyarakat yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di suatu negara dapat dianggap sebagai suatu program kebijakan yang mencakup tujuan-tujuan kesehatan, nilai-nilai kesejahteraan, dan praktek-praktek pelayanan yang disusun secara terperinci. Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai *“is whatever government choose to do or not to do”* (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan).

Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Kebijakan semacam itu sering kali diwujudkan dalam bentuk ketentuan atau peraturan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan kata lain, kebijakan publik biasanya diimplementasikan melalui instrumen-instrumen hukum yang memaksa untuk dipatuhi oleh masyarakat. Kebijakan publik cenderung mengalami proses yang terstruktur dan direncanakan dengan cermat, dan dalam banyak kasus, melibatkan proses konsultasi dan partisipasi publik serta pihak-pihak yang terkait.

1.5.5 E-Government

E-government adalah suatu model komunikasi baru antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, yang menggunakan teknologi informasi, khususnya internet, untuk meningkatkan standar pelayanan. Dalam esensinya, e-government merujuk pada penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik, bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dengan cara yang lebih efisien, efektif, dan interaktif. Berdasarkan Budi Rianto dkk (2012:36), Penggunaan E-Government memberikan kesempatan untuk meningkatkan dan memperbaiki interaksi antar lembaga pemerintah, juga antara pemerintah dengan sektor bisnis dan masyarakat.

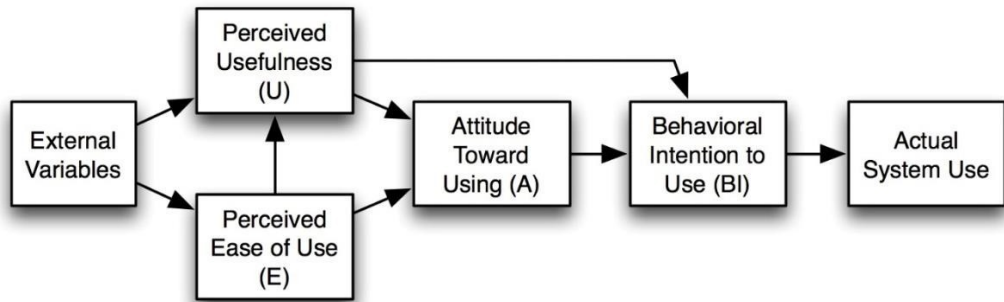
E-kinerja merupakan sebuah sistem digital yang inovatif yang dirancang untuk memantau, mengukur, dan mengevaluasi kinerja pegawai secara

komprehensif dalam suatu organisasi. Menggunakan teknologi informasi terkini, e-kinerja bertujuan untuk memastikan bahwa penilaian kinerja dilakukan dengan cara yang objektif, transparan, dan efisien. Sistem ini mengintegrasikan berbagai data kinerja pegawai, mulai dari pencapaian target kerja hingga kompetensi individu, sehingga menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai produktivitas dan kontribusi setiap pegawai. Dengan penerapan e-kinerja, organisasi dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses penilaian kinerja.

1.5.6 Technology Acceptance Model (TAM)

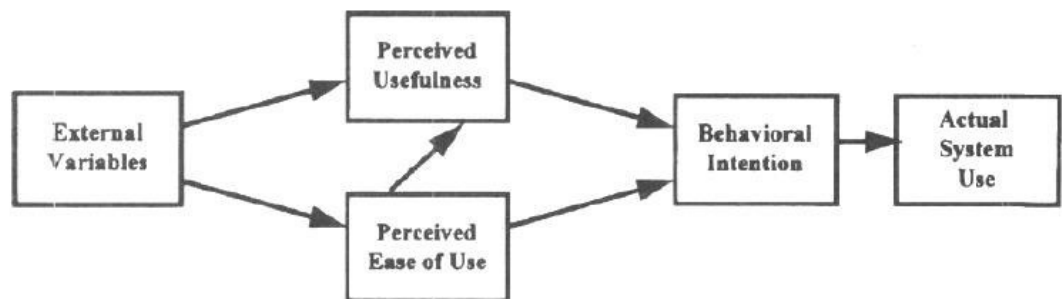
Technology acceptance model (TAM) merupakan teori penerimaan teknologi yang digunakan dalam penelitian ini. Technology Acceptance Model (TAM), yang diperkenalkan oleh Davis pada tahun 1989, merupakan adaptasi dari Theory of Reasoned Action (TRA) yang secara khusus dirancang untuk memodelkan penerimaan pengguna terhadap teknologi. TAM digunakan sebagai landasan untuk memahami hubungan antara persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan dalam mempengaruhi minat pengguna terhadap teknologi informasi.

TAM merupakan teori yang menjelaskan bagaimana persepsi pengguna terhadap teknologi dapat mempengaruhi minat mereka untuk menggunakan teknologi tersebut. Venkatesh dan Davis 1996 telah menyatakan eliminasi variabel sikap penggunaan sebab tidak mempengaruhi niat perilaku penggunaan. Berikut ini adalah bentuk dari model Technology Acceptance Model (TAM) yang dapat dilihat pada gambar di bawah:



Gambar 1.1 Technology Acceptance Model (TAM) (Davis et al., 1989)

Kemudian Venkatesh dan Davis pada tahun 1996 melakukan modifikasi pada TAM untuk beradaptasi perkembangan teknologi. Modifikasi yang mereka lakukan adalah menghilangkan salah satunya variabel yaitu sikap dalam menggunakan. Berikut adalah versi terakhir yang dikembangkan oleh Venkatesh & Davis pada tahun 1996.



Gambar 1.2 Technology Acceptance Model (TAM) Versi Terakhir (Davis et al., 1989)

1.5.7 Perceived Usefulness (PU)

Perceived Usefulness (PU) diartikan sebagai kepercayaan seseorang atau organisasi terhadap suatu sistem yang dapat memfasilitasi pekerjaannya. Ketika seseorang tidak percaya sistem dapat membantunya dalam melakukan pekerjaan, maka orang atau organisasi tersebut tidak berniat untuk menggunakannya (Aditya & Wardhana, 2016).

Arta & Azizah (2020) menyatakan bahwa *perceived usefulness* adalah suatu sistem yang bermanfaat dalam penggunaannya, maka akan banyak konsumen yang semakin minat dan memutuskan menggunakan layanan tersebut. Konsumen yang memiliki persepsi manfaat yang tinggi, maka dia akan termotivasi untuk menggunakan sistem tersebut. Widiyanti (2020) menyatakan bahwa *perceived usefulness* merupakan persepsi konsumen pada suatu sistem dapat mempercepat proses, meningkatkan efektifitas dan produktifitas dan bermanfaat bagi individu.

Dalam penelitian ini, dapat mengeksplorasi bagaimana *perceived usefulness* berperan dalam menentukan apakah aplikasi tersebut dapat berguna bagi pegawai di Kementerian Perhubungan. Menurut Venkatesh dan Davis (1996) ada 5 indikator dari persepsi kemanfaatan diantaranya ialah:

1. Efisiensi
2. Menjawab kebutuhan informasi
3. Efektif
4. Mempermudah pekerjaan
5. Bermanfaat

1.5.8 Perceived Ease of Use (PEoU)

Perceived Ease of Use merupakan tingkat keyakinan pengguna bahwa sistem dapat digunakan dan dipahami dengan mudah (Davis et al., 1989). Kemudahan penggunaan bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap komputer yang mudah dipahami dan sistem komputer yang mudah dipahami, dioperasikan, dan digunakan (Lee & Wan, 2010). Indikator *perceived ease of use* antara lain:

1. Teknologi informasi yang mudah dipelajari
2. Mudah terampil dalam penggunaan teknologi informasi

3. Teknologi informasi sangat mudah dioperasikan.

4. Fleksibel

Arta & Azizah (2020) menyatakan bahwa *perceived ease of use* adalah suatu sistem dirancang untuk memudahkan pengguna dan tidak menyulitkan. Kemudahan ini memiliki makna bahwa suatu layanan akan mudah dipahami dan dapat dengan mudah dioperasikan, sehingga konsumen akan mudah mempelajari tata cara penggunaan layanan.

Widiyanti (2020) menyatakan bahwa *perceived ease of us* merupakan persepsi mengenai suatu teknologi baru mudah dimengerti, mudah digunakan, mudah dijangkau dan praktis dalam penggunaannya. Adyas (2019) menyatakan bahwa *perceived ease of use* adalah suatu system yang dirancang bukan untuk menyulitkan pemakainya, akan tetapi penggunaan yang justru mempermudah seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Mahanani & Sari (2019) menyatakan bahwa *perceived ease of use* merupakan sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha. Davis dalam Fatuh (2017) mendefinisikan bahwa *perceived ease of use* adalah tingkat dimana seseorang percaya bahwa penggunaan sistem tertentu dapat mengurangi usaha seseorang dalam mengerjakan sesuatu. Dalam penelitian ini, persepsi kemudahan bermaksud untuk mengetahui seberapa mudah E-Kinerja tersebut digunakan oleh pegawai Kementerian Perhubungan untuk menyelesaikan pekerjaan. Misalnya, apakah aplikasi tersebut dapat digunakan dengan mudah.

1.5.9 Behavioral Intention to Use (BI)

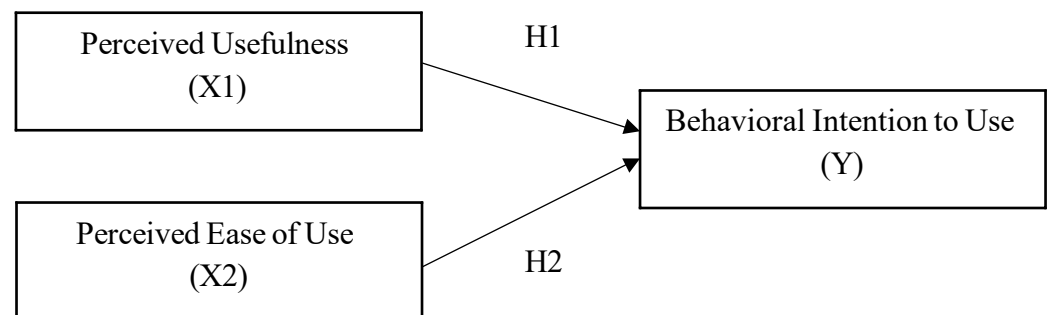
Davis Dalam Atriani (2020) menyatakan bahwa minat menggunakan merupakan tingkat seberapa kuat keinginan atau dorongan seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. Ketika seseorang melihat bahwa sesuatu akan bermanfaat, maka ia akan menjadi berminat sehingga hal tersebut akan mendatangkan dorongan seseorang untuk menggunakan produk tersebut.

Menurut Fishbein dan Ajzen (1975) dalam Theory of Reasoned Action, intensi perilaku adalah faktor motivasi yang memengaruhi perilaku seseorang. Mereka berpendapat bahwa intensi dipengaruhi oleh sikap individu terhadap perilaku tersebut dan norma subjektif. Sementara itu, Triandis (1980) dalam *theory of interpersonal behavior*-nya, mendefinisikan intensi perilaku sebagai hasil dari sikap, faktor sosial, dan kebiasaan. Ia menekankan bahwa intensi dipengaruhi oleh konsekuensi yang diharapkan dari perilaku, perasaan yang terkait dengan perilaku tersebut, dan tekanan sosial yang dirasakan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi intensi perilaku meliputi sikap seseorang terhadap teknologi, yang mencerminkan penilaian positif atau negatif terhadap penggunaan teknologi tersebut. Fishbein & Ajzen (1975) menjelaskan bahwa sikap ini terbentuk dari keyakinan dan pengetahuan tentang teknologi, serta pengalaman sebelumnya. Selain itu, norma subjektif juga berperan penting dalam membentuk intensi perilaku, yang berkaitan dengan bagaimana individu memandang pandangan orang-orang penting di sekitar mereka mengenai penggunaan teknologi tersebut. Fishbein & Ajzen (1975) menyebutkan bahwa pengaruh dari teman, keluarga, dan kolega dapat memengaruhi niat seseorang untuk

mengadopsi teknologi. Terakhir, *perceived behavioral control* mencakup keyakinan individu terhadap kemampuan mereka untuk menggunakan teknologi dan mengatasi tantangan yang mungkin muncul.

1.6 Hipotesis



Gambar 1.3 Hipotesis

H1: Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara *perceived usefulness* terhadap minat untuk menggunakan aplikasi E-Kinerja di Kementerian Perhubungan.

H2: Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara *perceived ease of use* terhadap minat untuk menggunakan aplikasi E-Kinerja di Kementerian Perhubungan.

1.6.1 Pengaruh Persepsi Kemanfaatan Pengguna (X1) terhadap Penerimaan Pengguna (Y)

Persepsi Kemanfaatan adalah sejauh mana pengguna percaya bahwa penggunaan teknologi akan meningkatkan kinerja atau produktivitas (Davis, 1989). Hal ini melibatkan pertimbangan apakah pengguna merasa bahwa teknologi tersebut memberikan manfaat atau keuntungan yang signifikan dalam menjalankan kegiatan, serta sebagai bahan pertimbangan untuk menerima atau tidak menerima

model layanan. Dalam konteks Technology Acceptance Model (TAM), persepsi kemanfaatan pengguna atau *perceived usefulness* adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan penerimaan teknologi baru oleh pengguna. Persepsi kemanfaatan menggambarkan sejauh mana pengguna percaya bahwa menggunakan suatu teknologi atau aplikasi akan meningkatkan kinerja mereka dalam melaksanakan tugas.

Ketika pengguna memiliki persepsi bahwa aplikasi atau teknologi tertentu berguna dan membantu menyelesaikan tugas dengan lebih efisien, persepsi positif ini akan meningkatkan minat dan niat mereka untuk mengadopsi teknologi tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi persepsi kemanfaatan pengguna terhadap suatu teknologi, semakin besar pula kemungkinan teknologi tersebut akan diterima dan digunakan.

Dalam penelitian tentang penerimaan teknologi, banyak temuan menunjukkan bahwa persepsi kemanfaatan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penerimaan pengguna. Artinya, ketika pengguna merasa bahwa teknologi atau aplikasi bermanfaat, mereka akan lebih cenderung untuk menerima, mendukung, dan menggunakan teknologi tersebut dalam jangka panjang.

1.6.2 Pengaruh Persepsi Kemudahan Pengguna (X2) terhadap Penerimaan Pengguna (Y)

Berdasarkan Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989) persepsi kemudahan diidentifikasi sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pengguna terhadap suatu teknologi atau sistem. Dalam Technology Acceptance Model (TAM), persepsi kemudahan

pengguna (*perceived ease of use*) adalah faktor penting yang memengaruhi penerimaan teknologi. Persepsi ini mengacu pada sejauh mana pengguna merasa bahwa menggunakan suatu teknologi atau aplikasi bebas dari kesulitan dan kerumitan.

Ketika pengguna merasa bahwa teknologi tersebut mudah dipahami dan digunakan, mereka cenderung memiliki sikap yang lebih positif terhadap teknologi tersebut. Hal ini karena teknologi yang mudah digunakan mengurangi hambatan teknis dan psikologis, sehingga meningkatkan kenyamanan dan efisiensi pengguna.

Persepsi kemudahan juga memiliki hubungan tidak langsung dengan penerimaan pengguna, karena kemudahan dalam penggunaan dapat meningkatkan persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*). Dengan kata lain, teknologi yang dianggap mudah digunakan cenderung juga dipandang lebih bermanfaat, yang pada akhirnya mendorong penerimaan pengguna.

Banyak penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi kemudahan pengguna terhadap suatu teknologi, semakin besar kemungkinan teknologi tersebut akan diterima dan digunakan oleh pengguna secara luas. Hal ini menunjukkan bahwa memberikan pengalaman pengguna yang intuitif, sederhana, dan bebas hambatan sangat penting dalam mendorong penerimaan teknologi.

Oleh karena itu, hubungan antara Kemudahan Penggunaan dan Intensi Perilaku untuk Menggunakan adalah hubungan yang penting, di mana persepsi positif terhadap kemudahan penggunaan suatu teknologi atau sistem dapat meningkatkan niat pengguna untuk menggunakannya. Pemahaman akan hubungan ini membantu pengembang dan pemasar teknologi dalam merancang serta

mempromosikan sistem yang tidak hanya memiliki manfaat, tetapi juga mudah dioperasikan, sehingga mendorong adopsi dan penggunaan teknologi di berbagai sektor (Davis et al., 1989; Venkatesh & Davis, 2000).

1.7 Definisi Konsep

Menurut Singarimbun dan Efendi (2008: 43), Definisi konseptual merupakan interpretasi atau pemaknaan suatu konsep yang digunakan dalam sebuah penelitian, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan konsisten sehingga peneliti dapat mengoperasionalkannya dengan baik di lapangan. Sugiono (2018:38) berpendapat bahwa definisi operasional adalah pemberian makna atau menentukan tindakan atau operasi konkret yang diperlukan untuk mengukur atau mengamati suatu variabel dalam konteks penelitian. Adapun definisi konseptual dari masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1.7.1 Persepsi Kemanfaatan (X1)

Persepsi kemanfaatan atau *perceived of usefulness* adalah kondisi dimana pengguna percaya bahwa dengan menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan kinerja mereka dalam bekerja. Menurut Vankatesh dan Davis (1996) persepsi kemanfaatan di representasikan dengan indikator reflektif berikut ini:

1. Efisiensi.

Efisiensi dalam konteks TAM mengacu pada kemampuan teknologi untuk menghemat waktu dan biaya bagi pengguna. Karena, pengguna cenderung lebih menerima teknologi baru jika teknologi tersebut dapat meningkatkan efisiensi mereka, yaitu menghemat waktu dan biaya dalam melakukan tugas.

2. Menjawab kebutuhan informasi.

Menjawab kebutuhan informasi berarti pengguna merasa bahwa teknologi dapat memberikan informasi yang diperlukan dan relevan untuk tugas atau pekerjaan mereka.

3. Efektif.

Efektif dalam konteks TAM mengacu pada keyakinan pengguna tentang sejauh mana teknologi tersebut akan membantu mereka dalam mencapai tujuan atau meningkatkan.

4. Mempermudah Pekerjaan.

Mempermudah pekerjaan dalam TAM, menjadikan pekerjaan menjadi lebih mudah dengan system informasi melakukan pekerjaan menjadi lebih mudah dalam memproses data dan informasi yang dibutuhkan.

5. Bermanfaat;

Dalam konteks TAM, bermanfaat merujuk pada penggunaan teknologi yang dianggap berguna oleh penggunanya, membantu mereka dalam mencapai tujuan tanpa memberikan terlalu banyak kesulitan dalam penggunaannya.

1.7.2 Persepsi Kemudahan Penggunaan (X2)

Persepsi kemudahan penggunaan merupakan keyakinan dari masyarakat bahwa dalam penggunaan teknologi tidak memerlukan usaha yang keras dan

terhindar dari kesulitan. Menurut Vankatesh dan Davis (1996) persepsi kemudahan di representasikan dengan indikator reflektif berikut ini:

1. Mudah dipelajari;

Jika seseorang percaya bahwa penggunaan teknologi itu mudah, mereka lebih cenderung menerima dan mengadopsi teknologi tersebut.

2. Jelas dan dapat dipahami;

Dalam konteks TAM, definisi teknologi yang jelas dapat dipahami dapat membantu dalam mengukur persepsi pengguna terhadap teknologi, yang kemudian memengaruhi niat untuk mengadopsi teknologi tersebut.

3. Fleksibel;

Dalam konteks TAM, fleksibel diartikan sebagai kemampuan teknologi untuk diakses oleh pengguna di berbagai lokasi atau perangkat. Serta memiliki kemampuan sistem untuk beradaptasi dengan berbagai jenis jaringan dan kondisi koneksi internet.

4. Mudah menjadi terampil;

Mudah untuk menjadi terampil, sistem informasi harus dapat mudah untuk dikuasai.

5. Mudah di akses;

Dalam konteks TAM, Mudah di akses merujuk pada sejauh mana individu percaya bahwa mereka akan menerima dan menggunakan teknologi dengan relatif mudah, tanpa memerlukan tingkat keahlian atau usaha yang tinggi dari pengguna.

1.7.3 Niat Perilaku untuk Menggunakan (Y)

Menurut Davis dalam Technology Acceptance Model (TAM), *behavioral intention to use* (intensi perilaku untuk menggunakan) adalah indikator utama dari niat seseorang untuk menerima dan menggunakan teknologi. Davis mengidentifikasi beberapa indikator untuk mengukur *behavioral intention to use* teknologi baru, yaitu:

(1) Keinginan untuk Menggunakan (*Desire to Use*):

Pengguna memiliki keinginan atau minat yang kuat untuk menggunakan teknologi dalam jangka waktu tertentu. Mereka mungkin tertarik untuk mencoba atau menggunakan teknologi secara aktif.

(2) Frekuensi Rencana Penggunaan (*Planned Usage Frequency*):

Indikator ini menunjukkan seberapa sering pengguna berencana untuk menggunakan teknologi. Semakin tinggi intensi, semakin sering mereka berencana untuk menggunakan teknologi tersebut.

(3) Kecenderungan untuk Menggunakan (*Likelihood of Use*):

Pengguna memiliki kecenderungan yang tinggi untuk menggunakan teknologi di masa mendatang, terutama dalam aktivitas atau tugas sehari-hari mereka.

(4) Kepastian untuk Menggunakan (*Intention Certainty*):

Sejauh mana pengguna merasa yakin bahwa mereka akan menggunakan teknologi tersebut. Keyakinan ini menunjukkan komitmen pengguna untuk mengadopsi teknologi secara konsisten.

1.8 Definisi Operasional

Tabel 1.4 Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Daftar Pertanyaan	Skala Pengukuran	Sumber
Perceived Usefulness (X1)	Mempermudah Pekerjaan (PU1)	Aplikasi E-Kinerja Memudahkan Saya Dalam Menyelesaikan Pekerjaan Di Kantor.	Skala 1-4: 1 = Sangat tidak setuju 4 = Sangat setuju	Rizki, M. F., & Siahaan, A. Y. S. (2023). Implementasi Program Electronic Kinerja (E-Kinerja) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. <i>SAJJAN A: Public Administration Review</i> , 1(1), 1-12.
	Menambah Produktivitas (PU2)	Saya dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat dengan menggunakan aplikasi ini.	Skala 1-4: 1 = Sangat tidak setuju 4 = Sangat setuju	Rizki, M. F., & Siahaan, A. Y. S. (2023). Implementasi Program Electronic Kinerja (E-Kinerja) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. <i>SAJJAN A: Public Administration Review</i> , 1(1), 1-12.

	Meningkatkan Efektivitas (PU3)	Saya dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah direncanakan.	Skala 1-4: 1 = Sangat tidak setuju 4 = Sangat setuju	Rizki, M. F., & Siahaan, A. Y. S. (2023). Implementasi Program Electronic Kinerja (E-Kinerja) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. <i>SAJJAN A: Public Administration Review</i> , 1(1), 1-12.
	Menambah Manfaat (PU4)	Saya merasa bahwa aplikasi E-Kinerja memberikan manfaat yang signifikan dalam mempermudah pekerjaan saya sehari-hari.	Skala 1-4: 1 = Sangat tidak setuju 4 = Sangat setuju	Rizki, M. F., & Siahaan, A. Y. S. (2023). Implementasi Program Electronic Kinerja (E-Kinerja) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. <i>SAJJAN A: Public Administration Review</i> , 1(1), 1-12.
	Meningkatkan Kinerja Pekerjaan (PU5)	Saya merasa bahwa aplikasi E-Kinerja dapat membantu saya mencapai target kinerja saya.	Skala 1-4: 1 = Sangat tidak setuju 4 = Sangat setuju	Rizki, M. F., & Siahaan, A. Y. S. (2023). Implementasi Program Electronic Kinerja (E-Kinerja) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan

				Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. <i>SAJJAN A: Public Administration Review</i> , 1(1), 1-12.
Perceived Ease of Use (X2)	Mudah Dipelajari (PE1)	Saya merasa aplikasi E-Kinerja mudah dipelajari.	Skala 1-4: 1 = Sangat tidak setuju 4 = Sangat setuju	Rizki, M. F., & Siahaan, A. Y. S. (2023). Implementasi Program Electronic Kinerja (E-Kinerja) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. <i>SAJJAN A: Public Administration Review</i> , 1(1), 1-12.
	Mudah Menjadi Terampil. (PE2)	Saya merasa cepat menguasai semua fitur-fitur yang ada di aplikasi E-Kinerja.	Skala 1-4: 1 = Sangat tidak setuju 4 = Sangat setuju	Rizki, M. F., & Siahaan, A. Y. S. (2023). Implementasi Program Electronic Kinerja (E-Kinerja) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. <i>SAJJAN A: Public Administration Review</i> , 1(1), 1-12.

	Mudah Digunakan (PE3)	Saya merasa nyaman dan mudah menggunakan aplikasi E-Kinerja.	Skala 1-4: 1 = Sangat tidak setuju 4 = Sangat setuju	Rizki, M. F., & Siahaan, A. Y. S. (2023). Implementasi Program Electronic Kinerja (E-Kinerja) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. <i>SAJJAN A: Public Administration Review</i> , 1(1), 1-12.
	Fleksibel (PE4)	Saya merasa nyaman menggunakan aplikasi E-Kinerja dengan berbagai perangkat.	Skala 1-4: 1 = Sangat tidak setuju 4 = Sangat setuju	Rizki, M. F., & Siahaan, A. Y. S. (2023). Implementasi Program Electronic Kinerja (E-Kinerja) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. <i>SAJJAN A: Public Administration Review</i> , 1(1), 1-12.
	Kejelasan dan Kemudahan Pemahaman (PE5)	Saya merasa aplikasi E-Kinerja ini memberikan instruksi yang jelas.	Skala 1-4: 1 = Sangat tidak setuju 4 = Sangat setuju	Rizki, M. F., & Siahaan, A. Y. S. (2023). Implementasi Program Electronic Kinerja (E-Kinerja) Aparatur Sipil Negara (ASN) di

				Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. <i>SAJJAN A: Public Administration Review, 1(1), 1-12.</i>
Behavioral Intention to Use (Y)	Memiliki Niat untuk Menggunakan (Y1)	Saya memiliki keinginan kuat untuk menggunakan aplikasi E-Kinerja.	Skala 1-4: 1 = Sangat tidak setuju 4 = Sangat setuju	Rizki, M. F., & Siahaan, A. Y. S. (2023). Implementasi Program Electronic Kinerja (E-Kinerja) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. <i>SAJJAN A: Public Administration Review, 1(1), 1-12.</i>
	Memprediksi akan Menggunakan (Y2)	Saya memiliki keyakinan bahwa saya akan konsisten menggunakan aplikasi E-Kinerja di masa depan.	Skala 1-4: 1 = Sangat tidak setuju 4 = Sangat setuju	Rizki, M. F., & Siahaan, A. Y. S. (2023). Implementasi Program Electronic Kinerja (E-Kinerja) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. <i>SAJJAN A: Public Administration Review, 1(1), 1-12.</i>

	Memiliki Rencana untuk Penggunaan di Masa Depan (Y3)	Saya akan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di aplikasi E-Kinerja untuk mencapai target pekerjaan saya selama bekerja.	Skala 1-4: 1 = Sangat tidak setuju 4 = Sangat setuju	Rizki, M. F., & Siahaan, A. Y. S. (2023). Implementasi Program Electronic Kinerja (E-Kinerja) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. <i>SAJJAN A: Public Administration Review</i> , 1(1), 1-12.
--	--	--	--	--

1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Menurut Siyoto & Sodik dalam (Hardani et al., 2020), metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka, mulai saat pengumpulan data, hingga analisis data dan penampilan data.

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan kuantitatif. Sugiyono (2015) mengungkapkan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data dalam bentuk angka dengan analisis statistik. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian eksplanatori, yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti melalui pengujian hipotesis (Singarimbun & Effendi, 2011). Penelitian ini bertujuan untuk menguji teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis yang

berasal dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada pengaruh antara variabel *perceived usefulness* (X1) dan *perceived ease of use* (X2) sebagai variabel independen, serta variabel *behavioral intention of use* (Y) sebagai variabel dependen.

1.9.2 Populasi dan Sampel

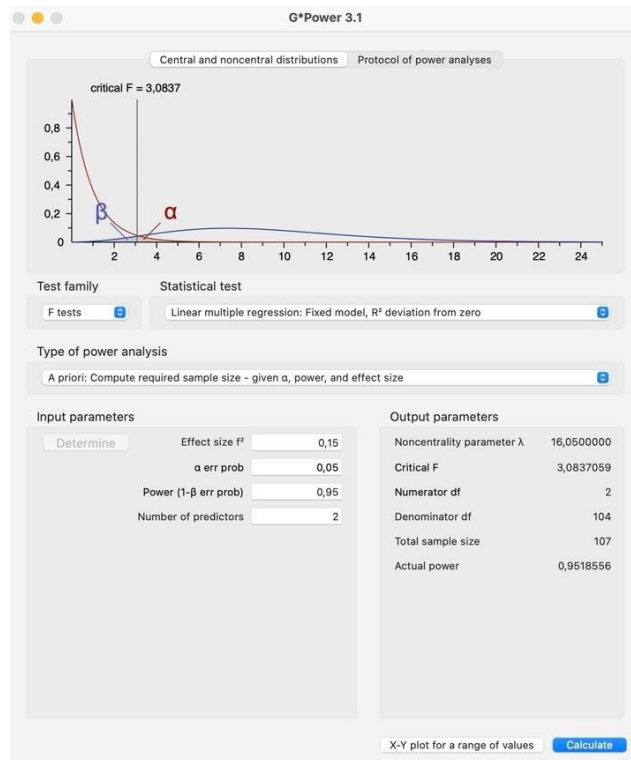
1.9.2.1 Populasi

Populasi menurut Priyono (2018), merupakan keseluruhan gejala yang akan diteliti. Sementara itu, menurut Margono dalam (Hardani et al., 2020) populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang meliputi manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala, nilai dan peristiwa sebagai sumber data dengan Karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini yaitu pegawai Kementerian Perhubungan yang menggunakan aplikasi E-Kinerja. Pegawai di Kementerian Perhubungan sendiri berjumlah 20.921 pegawai.

1.9.2.2 Sampel

Hair et al. (2013) menjelaskan bahwa ukuran sampel sangat penting dalam *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM). Salah satu metode yang umum digunakan untuk menentukan ukuran sampel adalah dengan "aturan 10 kali lipat." Aturan ini menetapkan bahwa jumlah sampel harus minimal 10 kali lipat dari jumlah indikator formatif terbesar atau jalur struktural yang paling banyak mengarah pada satu konstruk dalam model. Sebagai alternatif, analisis daya statistik dengan menggunakan alat seperti *GPower* dapat memberikan pendekatan yang lebih akurat untuk memastikan daya statistik yang cukup dalam mendeteksi efek signifikan. Dalam penelitian ini, karena jumlah populasi pengguna aplikasi E-

Kinerja di Kementerian Perhubungan tidak diketahui secara pasti, perhitungan ukuran sampel dilakukan menggunakan *GPower*.



Gambar 1.4 Perhitungan Ukuran Sampel Dilakukan Menggunakan *Gpower*

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 107 responden.

1.9.3 Teknik Pengambilan Data

Penelitian yang berjudul "Implementasi Aplikasi E-Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan" menggunakan teknik non-probability sampling. Teknik ini tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel (Sugiyono, 2007). Metode sampling yang dipilih adalah kombinasi purposive sampling dan convenience sampling, di mana pemilihan sampel dilakukan berdasarkan kriteria tertentu. Menurut Sugiyono (2019), teknik ini melibatkan pertimbangan tertentu yang telah ditentukan

sebelumnya oleh peneliti. Peneliti menetapkan kriteria terlebih dahulu sebelum menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Adapun kriteria responden yang memenuhi syarat untuk menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Responden harus pegawai Kementerian Perhubungan
2. Responden harus menggunakan aplikasi E-Kinerja

Pengambilan sampel akan dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada pengguna aplikasi E-Kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.

1.9.4 Jenis Data Dan Sumber Data

1.9.4.1 Jenis Data

Menurut Sugiyono (2018:13) data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan *positivistic* (data konkrit), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Data kuantitatif yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari jawaban kuesioner yang dibagikan kepada responden. Filsafat positivistic digunakan ada populasi dan sampel tertentu.

1.9.4.2 Sumber Data

1. Data Primer

Hair et al. (2013) mendefinisikan data primer sebagai data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dengan tujuan khusus untuk menjawab kebutuhan penelitian tertentu. Data primer umumnya diperoleh melalui metode seperti survei, wawancara, observasi, atau kuesioner yang dirancang sesuai

dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada pegawai di Kementerian Perhubungan yang menggunakan aplikasi E-Kinerja sebagai sarana untuk mendukung dan mempermudah pelaksanaan tugas mereka.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan kuesioner terstruktur yang dirancang untuk menggali pandangan, pengalaman, dan niat pengguna terhadap aplikasi. Kuesioner ini disebarluaskan secara daring melalui media sosial dan email, serta secara langsung kepada pegawai Kementerian Perhubungan. Responden akan diminta mengisi kuesioner yang berisi pertanyaan tentang frekuensi penggunaan, kepuasan, dan persepsi terhadap manfaat aplikasi. Jenis pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan tertutup dengan skala Likert, sehingga data yang terkumpul dapat diolah secara kuantitatif untuk dianalisis lebih lanjut.

2. Data Sekunder

Hair et al. (2013) menjelaskan bahwa data sekunder merupakan data yang telah tersedia sebelumnya dan dapat diakses dengan mudah, biasanya berasal dari basis data, penelitian terdahulu, atau dokumen resmi pemerintah. Data ini digunakan kembali oleh peneliti untuk memberikan dukungan dan konteks bagi penelitian yang sedang dilakukan, meskipun tidak secara spesifik dikumpulkan untuk tujuan tersebut. Dalam penelitian ini, pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber terpercaya, termasuk buku, tesis, artikel ilmiah, jurnal penelitian, dan sumber daring yang kredibel. Peneliti akan memanfaatkan basis data akademik, perpustakaan, dan platform daring untuk

mencari literatur dan studi yang relevan dengan aplikasi E-Kinerja serta kerangka *Technology Acceptance Model* (TAM). Data sekunder ini akan memberikan landasan teoretis, melengkapi temuan data primer, serta memperkaya pemahaman tentang konteks layanan publik berbasis digital. Dengan demikian, data sekunder akan mendukung penelitian ini melalui perspektif yang sudah ada dan memberikan kedalaman tambahan pada hasil penelitian.

1.9.5 Skala Pengukuran

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti perlu menetapkan terlebih dahulu skala pengukuran yang akan digunakan. Dalam penelitian ini, skala pengukuran yang dipilih adalah Skala Likert. Skala ini sering digunakan dalam penelitian berbasis *self-report* untuk mengukur sejauh mana responden setuju atau tidak setuju terhadap suatu isu yang menjadi fokus penelitian. Menurut Sugiyono (2018:152) skala likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Fenomena sosial ini telah didefinisikan secara spesifik sebagai variabel penelitian oleh peneliti. Selanjutnya, variabel-variabel tersebut dirinci menjadi indikator-indikator tertentu, yang kemudian diukur menggunakan skala Likert untuk membentuk dasar penyusunan pertanyaan dalam kuesioner. Ketentuan jawaban dengan bobot rendah diberi nilai 1 dan seterusnya sampai jawaban dengan bobot tinggi diberi nilai 4. Setiap jawaban akan disebutkan dengan ketentuan:

Tabel 1.5 Skala Pengukuran

Jawaban	Skor
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Setuju	3
Sangat Setuju	4

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan serangkaian proses yang digunakan untuk memperoleh informasi yang dapat dianalisis lebih lanjut. Dalam pendekatan kuantitatif, pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti kuesioner, wawancara, observasi, atau kombinasi dari ketiganya (Sugiyono, 2013). Penelitian ini memanfaatkan data primer yang diperoleh melalui kuesioner, serta data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk artikel ilmiah, buku, sumber daring, dan referensi lainnya yang relevan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

1. Kuesioner

Menurut Sugiyono (2017:142) angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Metode kuesioner merupakan cara yang efisien, terutama jika peneliti telah mengetahui variabel yang ingin diteliti dan jumlah responden yang cukup banyak serta tersebar di wilayah yang luas. Metode ini dilakukan melalui survei dengan memberikan sejumlah

pertanyaan atau pernyataan kepada sampel yang telah ditentukan. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data terkait dengan responden dan variabel penelitian. Pertanyaan yang diajukan dirancang untuk memperoleh informasi yang relevan dengan masalah penelitian, dengan tujuan agar data yang terkumpul dapat memberikan kontribusi berarti terhadap penelitian ini.

Kuesioner ini dirancang untuk mengumpulkan informasi mengenai persepsi, pengalaman, dan niat responden terkait aplikasi tersebut. Kuesioner akan disebarkan baik secara daring melalui email, maupun secara langsung kepada pegawai Kementerian Perhubungan yang menggunakan aplikasi E-Kinerja. Responden akan diminta untuk menjawab pertanyaan tentang seberapa sering mereka menggunakan aplikasi, tingkat kepuasan, dan manfaat yang mereka rasakan. Survei ini akan menggunakan pertanyaan tertutup dengan skala Likert agar data yang terkumpul dapat dianalisis secara kuantitatif.

2. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah sumber informasi yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang relevan dengan topik penelitian. Kajian literatur ini diperoleh dari berbagai sumber, seperti internet, buku, tesis, artikel ilmiah, dan jurnal penelitian yang berkaitan dengan studi ini. Dalam konteks penelitian ini, tinjauan pustaka difokuskan pada *Technology Acceptance Model* (TAM), khususnya variabel *perceived usefulness*, *perceived ease of use*, dan *user intention*.

Proses tinjauan pustaka dilakukan dengan menelusuri dan mengevaluasi berbagai sumber relevan secara sistematis, termasuk buku, tesis, artikel ilmiah, jurnal penelitian, serta sumber daring terpercaya. Penelitian ini berfokus pada

pengumpulan teori dan studi sebelumnya yang terkait dengan *Technology Acceptance Model* (TAM), terutama yang membahas variabel utama seperti *perceived usefulness*, *perceived ease of use*, dan *user intention*. Untuk mendukung kerangka konseptual dan memahami hubungan antarvariabel, peneliti akan memanfaatkan basis data akademik serta perpustakaan. Literatur yang dikumpulkan akan menjadi dasar teoretis untuk menganalisis dan menginterpretasikan hasil penelitian.

1.9.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah prosedur atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dengan tujuan mengidentifikasi pola, menentukan hubungan, atau menarik kesimpulan yang dapat mendukung proses pengambilan keputusan. Teknik ini mencakup berbagai pendekatan, seperti analisis statistik, deskriptif, inferensial, prediktif, dan lainnya, yang disesuaikan dengan tujuan dan jenis data yang dianalisis.

Menurut Sugiyono (2020:131) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

1.9.7.1 Uji Partial Least Square (PLS)

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data *Structural Equation Modeling* (SEM) yang didukung oleh perangkat lunak statistik Smart PLS.

Berdasarkan Hair et al. (2014), teknik ini bertujuan untuk mengembangkan teori eksploratif dengan mengidentifikasi pola dan hipotesis dari data yang diperoleh.

SEM sering dimanfaatkan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, seperti *Behavioral Intention to Use* (Y) dalam penelitian ini, serta untuk menggali hubungan yang lebih mendalam antar variabel.

Muniarti et al. (2013) menambahkan bahwa PLS-SEM cocok digunakan untuk mengevaluasi model yang melibatkan variabel laten yang merepresentasikan konstruk perilaku. Teknik ini tidak memerlukan distribusi data tertentu untuk estimasi parameter, sehingga pengujian signifikansi parameter tidak membutuhkan metode parametrik. Evaluasi model pengukuran dengan indikator reflektif dilakukan melalui pengujian validitas konvergen dan diskriminan pada indikator, serta reliabilitas komposit untuk kelompok indikator. Hal ini memastikan bahwa alat ukur yang digunakan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang memadai.

1.9.7.2 Analisis Outer Model (Model Pengukuran)

1.9.7.2.1 Uji Validitas

Hair et al. (2014) menjelaskan bahwa validitas mengacu pada sejauh mana alat ukur dapat mengukur konstruk yang dimaksud dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti convergent validity, discriminant validity, dan content validity untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian alat ukur dengan konstruk. Sebuah kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner tersebut mampu mengungkapkan suatu variabel yang sedang diteliti.

a. Convergent Validity

Validitas konvergen adalah alat yang digunakan untuk mengukur validitas reflektif sebagai ukuran variabel, yang dapat dilihat melalui nilai *outer loading* dari setiap indikator variabel (Sugiyono, 2016). Model pengukuran dengan indikator reflektif dievaluasi berdasarkan korelasi antara skor item/komponen dengan skor konstruk yang dihitung menggunakan PLS. Menurut Ghazali dan Latan (2015), ukuran refleksi individual ini dianggap valid jika *loading factor* lebih dari 0,70 dengan konstruk yang diukur.

Selain itu, Hair et al. (2019) menyatakan bahwa *factor loading* yang lebih besar dari 0,5 menunjukkan kontribusi signifikan terhadap konstruk yang diukur. *Factor loading* di atas 0,5 dianggap baik untuk validitas konstruk, sementara nilai di bawah 0,5 dapat menunjukkan bahwa indikator tersebut tidak cukup berkontribusi pada konstruk. Ghazali (2014) juga mendukung pandangan ini dengan menyatakan bahwa *factor loading* yang lebih tinggi dari 0,5 menunjukkan bahwa variabel memiliki pengaruh yang kuat terhadap konstruk, sehingga dapat dianggap layak digunakan dalam model.

b. Discriminant Validity

Pengujian ini dievaluasi berdasarkan *cross loading* dari pengukuran terhadap konstruk, atau dengan kata lain, menilai tingkat prediksi konstruk laten terhadap blok indikatornya. Untuk menentukan apakah prediksi konstruk laten terhadap blok indikatornya baik atau tidak, dapat

dilihat dari nilai akar kuadrat Average Variance Extracted (AVE). Prediksi dianggap memiliki nilai AVE yang baik jika nilai akar kuadrat AVE untuk setiap konstruk laten lebih besar daripada korelasi antara konstruk laten. Menurut Henseler et al. (2015), metode ini merupakan cara yang efektif untuk menguji validitas diskriminan.

c. Average Variance Extracted (AVE)

Pengujian ini bertujuan untuk menilai rata-rata *communality* dari setiap variabel laten dalam model reflektif. Nilai AVE harus lebih dari 0,50 yang menunjukkan bahwa faktor laten mampu menjelaskan setidaknya setengah dari variansi setiap indikatornya. Menurut Fornell dan Larcker (1981), yang didukung oleh penelitian Hair et al. (2019), hal ini memastikan bahwa variabel laten memiliki kemampuan prediksi yang memadai terhadap indikator-indikatornya.

1.9.7.2.2 Uji Reliabilitas

Menurut Ghazali dan Latan (2015), pengujian reliabilitas adalah metode analisis yang digunakan untuk mengukur kuesioner yang menunjukkan variabel atau konstruk. Sebuah kuesioner dianggap reliabel jika respons seseorang terhadap pernyataan tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas yang dapat dilakukan dalam penelitian ini adalah Composite Reliability. Uji ini bertujuan untuk mengukur konsistensi internal atau reliabilitas model pengukuran, dengan nilai yang harus melebihi 0,70. Composite Reliability merupakan metode alternatif yang lebih akurat dibandingkan Cronbach's Alpha dalam menguji

reliabilitas. Menurut Hair et al. (2016), Composite Reliability memberikan estimasi yang lebih tepat dibandingkan Cronbach's Alpha.

1.9.7.3 Analisis Inner Model (Model Struktural)

Analisis Inner Model bertujuan untuk memahami hubungan sebab akibat antara variabel laten yang diuji dalam sebuah model. Salah satu cara untuk menilai kekuatan Inner Model adalah dengan menggunakan R-square (Ghozali & Latan, 2015). R-square adalah nilai yang menunjukkan sejauh mana variabel independen (eksogen) memengaruhi variabel dependen (endogen). R-square merupakan angka yang berkisar antara 0 hingga 1, yang menunjukkan besarnya pengaruh gabungan variabel independen secara bersama-sama terhadap nilai variabel dependen.

Nilai R-squared (R^2) digunakan untuk menilai seberapa besar pengaruh variabel laten independen terhadap variabel laten dependen. Terdapat tiga kategori pengelompokan dalam nilai R-square, yaitu kategori kuat, kategori moderat, dan kategori lemah (Hair et al., 2011). Hair et al. menyatakan bahwa nilai R-square 0,75 termasuk dalam kategori kuat, nilai R-square 0,50 termasuk dalam kategori moderat, dan nilai R-square 0,25 termasuk dalam kategori lemah (Hair et al., 2011).

Langkah selanjutnya adalah untuk menentukan signifikansi hubungan antar variabel menggunakan metode *bootstrapping* untuk menganalisis nilai koefisien parameter dan nilai T-statistic (Ghozali & Latan, 2015). Koefisien jalur berada antara -1 dan 1, jadi semakin mendekati nilai +1 menunjukkan hubungan variabel yang positif, sedangkan semakin mendekati nilai 0 menunjukkan hubungan variabel yang negatif.

1.9.7.4 Uji Hipotesis

Pendekatan penelitian eksplanatori biasanya digunakan untuk menjelaskan dan memahami hubungan sebab-akibat antara variabel dalam suatu fenomena atau peristiwa. Partial Least Square (PLS) merupakan salah satu metode statistik yang sering digunakan dalam penelitian eksplanatori untuk menganalisis hubungan antar variabel dan menguji hipotesis (Muniarti et al., 2013). Dalam PLS, pengujian hipotesis umumnya melibatkan t-statistik dan nilai probabilitas (p-value). Secara umum, nilai t-statistik yang lebih besar dari 1,96 (dengan tingkat signifikansi 0,05) menunjukkan adanya hubungan yang signifikan. Selain itu, menurut Hair et al. (2014), dalam uji hipotesis menggunakan PLS-SEM, nilai p-value yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan (biasanya 0,05) menandakan bahwa hasilnya signifikan secara statistik. Ini berarti peneliti akan menolak hipotesis nol (H_0) dan menerima hipotesis alternatif (H_a). Namun, ambang batas yang berbeda, seperti 0,10, juga bisa digunakan tergantung pada desain penelitian dan tingkat kepercayaan yang diinginkan.